



RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 1 – MEDAN
SATRIA KOTA BEKASI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas tersusunnya dokumen RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2026. Sistematika dan isi dokumen perencanaan ini dibuat berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kota Bekasi, Agustus 2025

KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BEKASI



KARTO, S.IP, M.SI
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19670415 198603 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI.....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL.....iv

DAFTAR GAMBAR.....iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Landasan Hukum..... 5

1.3 Maksud dan Tujuan.....6

1.4 Sistematika Penulisan.....7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU...8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....8

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP..... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 20

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat DaerahError! Bookmark not defined.

2.4 Review Terhadap Rancangan RPJMD.....28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....48

BAB III TUJUAN, SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI..... 50

3.1 Telaah Kebijakan Nasional..... 50

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP.....52

3.3 Program dan Kegiatan..... 54

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI.....68

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 68

BAB V PENUTUP..... 7677

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (tahun berjalan).....	11
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025.....	22
Tabel 2.4	Analisis SWOT terkait Strategis dalam Menghadapi Peluang dan Tantangan yang Dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja.....	25
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....	49
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2030.....	51
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bekasi Tahun 2025-2030.....	52
Tabel 3.3	Tujuan dan Indikator Tujuan Program Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Tahun 2026.....	53
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran dan Target Rencana Kerja Tahun 2026 berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (RPJMD Kota Bekasi).....	53
Tabel 3.5	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 (sumber SIPD RI 2025).....	55
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2026.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RPJMD Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.....	4
------------	--	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan telah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah .

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1, Nomor 11, menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya pada Pasal 7, Ayat (2) dijelaskan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang termuat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan beberapa Perundangan di atas. keterkaitan Renja Satpol PP dengan RKPD dan Renstra adalah hirarkis dan berjenjang: Renstra (dokumen 5 tahunan) menjadi panduan untuk menyusun Renja (dokumen tahunan), dan RKPD (dokumen tahunan pemerintah daerah) menjadi dasar bagi Renja SKPD (termasuk Satpol PP) untuk merinci program dan kegiatan tahunan yang konsisten dengan tujuan jangka menengah (Renstra) dan prioritas pembangunan daerah (RKPD)

Penyusunan Renja-SKPD diatur dengan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintah Daerah, Pasal 273, Ayat (3) dan Ayat (4). Penyajian Dokumen Renja-SKPD selanjutnya diatur pada **Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Halaman 400-408. Tata cara perencanaan pembangunan daerah dan tata cara perubahan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah di Kota Bekasi diatur dengan **Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah**. Selanjutnya pedoman dan/atau acuan serta landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh diatur dengan **Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah**.

Salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu **ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat** diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 12 huruf e. Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi diatur dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Pada Pasal 3 diatur bahwa Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi terdiri atas:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Ketenteraman Masyarakat;
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- d. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Personil, membawahkan:
 1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat;
 2. Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Bina Personil.
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya, membawahkan:
 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 2. Seksi Kewaspadaan Dini.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Data dan Informasi;

2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

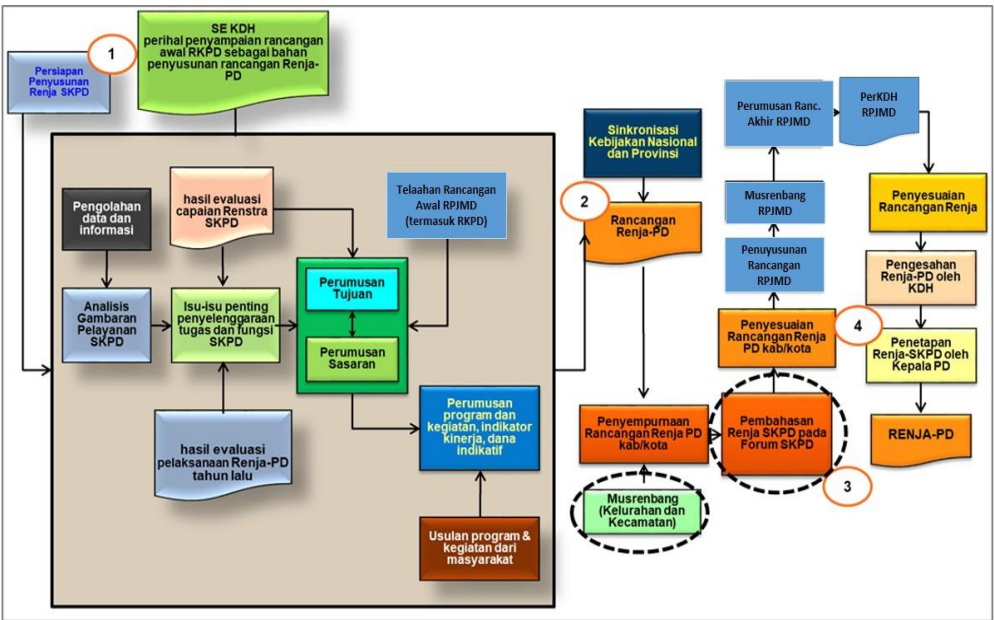
Rencana Kerja (Renja) Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun setiap tahun guna mewujudkan sasaran pembangunan sesuai Visi dan Misi dari masing-masing SKPD yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Hasil Renja SKPD dilanjutkan dengan penyusunan anggaran yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) sehingga dapat terlihat jumlah pagu indikatif, sebelum akhirnya menjadi pagu definitif yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

RENCANA KERJA (RENJA) AKHIR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI TAHUN 2026 disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Akhir Renja SATPOL PP Kota Bekasi berpedoman pada Renstra SATPOL PP Kota Bekasi, hasil evaluasi hasil Renja perangkat daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja perangkat daerah tahun berjalan.
2. Rancangan Akhir Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2026 dimasukkan ke dalam SIPD dan disampaikan kepada Kepala BAPPELITBANGDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2026.
3. Penyusunan RPJMD 2025 - 2030 berdasarkan:
 - a. rancangan Renja seluruh perangkat daerah yang didalamnya termasuk aspirasi masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan (melalui Musrenbang) yang telah diverifikasi serta penelaahan atas pokok-pokok pikiran hasil reses DPRD; dan
 - b. hasil penelaahan terhadap Rancangan RPJMD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
4. Penyusunan Rancangan Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Akhir Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2026 berdasarkan Surat Edaran Wali Kota tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Penyusunan Rancangan Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2026 adalah proses penyempurnaan rancangan akhir Renja berdasarkan:
 - a. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah;

- b. hasil usulan aspirasi masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan yang telah diverifikasi; dan
 - c. hasil penelaahan atas pokok-pokok pikiran reses DPRD.
6. Rancangan Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2026 dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.
7. Proses penyempurnaan rancangan Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2026 menjadi Rancangan Akhir Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2026.
8. Perumusan Rancangan Akhir Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2026 dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu SATPOL PP Kota Bekasi berdasarkan program, kegiatan & pagu indikatif dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun.
9. Rancangan Akhir Renja SATPOL PP Kota Bekasi Tahun 2026 disampaikan Kepala SATPOL PP Kota Bekasi kepada Kepala BAPPELITBANGDA Kota Bekasi untuk diverifikasi.
10. BAPPELITBANGDA menyampaikan seluruh rancangan akhir renja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.



Gambar 1.1.
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renja dengan RPJMD

(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. PP ini merupakan turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 dan merinci lebih lanjut tugas, fungsi, serta kewenangan Satpol PP.

11. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029..
17. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
18. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
19. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud Penyusunan Rancangan Akhir Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2026 adalah untuk menciptakan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Bekasi.

B. Tujuan

- 1) Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Satpol PP yang telah disusun sebelumnya yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan;
- 2) Menciptakan sinergitas Perencanaan secara Berkesinambungan antara berbagai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

- 3) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan;
- 4) Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2026;
- 5) Dan Menjadi alat observasi untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2026 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab 1 (satu) Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
2. Bab 2 (dua) Bab ini menggambarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap RPJMD Kota Bekasi serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. Bab 3 (tiga) adalah Tujuan, Sasaran serta menggambarkan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan, dan Sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan.
4. Bab 4 (empat) berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
5. Bab 5 (lima) Penutup berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauh mana keberhasilan dan kemampuan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh SKPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun Lalu (n-2) yaitu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2025, memiliki sasaran yang harus diwujudkan yaitu: Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 melaksanakan 2 (dua) program utama yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan yang didukung oleh beberapa kegiatan yaitu :

- 1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- 1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan pada Tahun 2025 tersebut didukung dengan anggaran sebesar **Rp99.151.725.211**(Sembilan puluh sembilan milyar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah), yaitu meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki anggaran Rp 75.715.995.731(Tujuh puluh lima milyar tujuh ratus lima belas juta dua ratus sebelas ribu rupiah), dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp 23.435.729.480 (Dua puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilanempat ratus delapan puluh rupiah). Sebagian besar anggara kurang lebih tujuh puluh enam persen digunakan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.Secara rinci dapat lihat pada **Tabel 2.1**

Tabel 2.1
Anggaran Pelaksanaan Program Renja Tahun 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI	ANGGARAN (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75.715.995.731
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	23.435.729.480
JUMLAH	99.151.725.211

Selanjutnya hasil evaluasi kinerja Tahun 2023 dan 2025 jika dikaitkan dengan target pencapaian Renstra Satpol PP adalah sebagai berikut dapat dilihat pada **Tabel 2.2** berikut :

1. Tingkat Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun-2 adalah 96,25 % dan pada Tahun berjalan adalah 98,75 %. Sedangkan,
2. Tingkat Realisasi untuk Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun-2 adalah 87, 09 % dan pada Tahun berjalan adalah 95,70 %.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025
(tahun berjalan) Kota Bekasi

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Tahun 2025		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	(Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	110
						Satuan Polisi Pamong Praja									
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100 %	100 %	100 %	96.25%	96.25	100 %	98.75	98.75
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		100 %				100 %		

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2 Dokumen		
1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1 Dokumen		
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10 Laporan		
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan						100 %		
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						224 Orang/bulan		
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 Laporan		
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan						18 Laporan		

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026

							Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD								
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah						100 %		
	1	05	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai									
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						15 Unit		
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						1 Paket		
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						58 Orang		
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan						100 %		
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket		
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						5 Paket		
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik						4 Paket		

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026

						Kantor yang Disediakan								
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						3 Paket		
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						12 Dokumen		
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						12 Laporan		
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 Laporan		
	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						-		
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel					100 %		
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						-		
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang						45 Unit		

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026

						Disediakan								
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan						100 %	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel						100 %	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						6 Unit	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						58 Unit	
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						30 Unit	
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

2	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Peneyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	100%	100%	100%	87.09%	87.09	100%	95.70	95.70
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat						-		
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						4 Dokumen		
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum									
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum						12 Dokumen		
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia									
							Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya						500 Orang		
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar						5 Dokumen		

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

							Lembaga dan Kemitraan									
							dalam Teknik Pencegahan Kejahatan									
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan										
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan							116 laporan		
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa										
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan							12 Laporan		
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah										
							Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani							1 Laporan		
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban							15 Unit		

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

						Umum yang Tersedia								
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota						-	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						1 Laporan	
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah								
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP						12 Laporan	
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						12 Laporan	
	1	05	02	2	03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota								
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada						0%	

Berdasarkan hasil realisasi capaian indikator Program sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.2 diatas, dari 9 (sembilan) Indikator Program seluruhnya menunjukkan tren positif, walaupun belum mencapai target 100%. Faktor-faktor pendukung terwujudnya tren positif adalah sebagai berikut :

1. Adanya Komitmen tim penyusunan dokumen perencanaan dan tim verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) dalam merumuskan kegiatan, indikator kegiatan dan targetnya serta kebutuhan pendanaannya;
2. Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD/RPJMD) dan verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja/Renstra) yang detail/rinci sehingga memudahkan Tim untuk melaksanakan tugasnya; serta
3. Dilaksanakannya monitoring secara berkala terkait pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi yaitu pengumpulan data masukan capaian/realisasi dari Perangkat Daerah terhambat/beberapa terlambat sehingga waktu pengumpulan dan pengolahan data serta perumusan analisis dan rekomendasi menjadi lebih singkat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dapat dilaksanakan berdasarkan Fungsi dan tugas Satpol PP Kota Bekasi serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja Satpol PP Kota Bekasi.

Pada Tahun (n-2) yaitu Tahun 2024, Satpol PP Kota Bekasi memiliki sasaran yang harus diwujudkan yaitu Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat, dengan Indikator Tujuan adalah Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentram dan Ketertiban Umum dengan 3 (tiga) SPM, yaitu meliputi : (1) Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada, (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada, (3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM; dan (4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material.

Pencapaian kinerja terkait SPM 1 yaitu ketersediaan sarana dan prasarana Satpol PP baru tercapai (98%) dan belum sepenuhnya memenuhi standar minimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Satpol PP. Beberapa fasilitas seperti kendaraan patrol belum terpenuhi secara maksimal. Keterbatasan ini berdampak pada cakupan wilayah patroli, kecepatan respon terhadap aduan masyarakat, serta efektivitas operasi lapangan.

Pencapaian kinerja SPM 2 yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP telah mencapai (100%). Pencapaian kinerja SPM 2 ini dalam rangka penegakan perda dan perkada, bahwa saat ini Satpol PP telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan penegakan Perda dan Perkada, mulai dari penerimaan aduan, verifikasi lapangan, pelaksanaan operasi, hingga pelaporan hasil. Namun, sebagian SOP masih bersifat umum dan belum diperbarui sesuai ketentuan terbaru perundang-undangan dan perkembangan teknologi informasi.

Pencapaian kinerja untuk SPM 3 telah mencapai (100%), Jumlah PNS Satpol PP yang telah lulus Diklat Dasar dan anggota Satlinmas yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM masih belum mencapai standar minimal SPM. Sebagian besar personel lapangan telah mendapatkan pelatihan teknis dasar, namun belum seluruhnya mengikuti diklat yang bersertifikat nasional.

Pencapaian kinerja terkait SPM 4(belum terealisasi), bahwa Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) sering berdampak pada kerugian material, baik terhadap masyarakat maupun pelaku usaha. Standar pelayanan dalam menangani dampak tersebut telah tersedia.

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menunjukkan Tren Positif dengan Capaian Indikator yang sejalan dengan target Renstra. Keberhasilan ini didukung oleh kegiatan dan kerja sama lintas OPD dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang responsif. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bekasi Tahun 2025, Provinsi Jawa Barat

NO	Indikator	SPM	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentram dan Ketertiban Umum	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%	100%	Ketersediaan sarana dan prasarana Satpol PP belum sepenuhnya memenuhi standar minimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Satpol PP. Beberapa fasilitas seperti kendaraan patroli. Keterbatasan ini berdampak pada cakupan wilayah patroli, kecepatan respon terhadap aduan masyarakat, serta efektivitas operasi lapangan.
2		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan penegakan Perda dan Perkada, mulai dari penerimaan aduan, verifikasi lapangan, pelaksanaan operasi, hingga pelaporan hasil. Namun, sebagian SOP masih bersifat umum dan belum diperbarui sesuai ketentuan terbaru perundang-undangan dan perkembangan teknologi informasi.

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026

3		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah PNS Satpol PP yang telah lulus Diklat Dasar dan anggota Satlinmas yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas SDM masih belum mencapai standar minimal SPM. Sebagian besar personel lapangan telah mendapatkan pelatihan teknis dasar, namun belum seluruhnya mengikuti diklat yang bersertifikat nasional.
4		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) sering berdampak pada kerugian material, baik terhadap masyarakat maupun pelaku usaha. Standar pelayanan dalam menangani dampak tersebut telah tersedia

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi telah dianalisis capaian kinerja, baik itu IKU maupun IKK. Dari hasil capaian kinerja tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih tingginya kasus pelanggaran perda oleh masyarakat.
2. Masih kurang dan belum optimalnya personil linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
4. Belum optimalnya manajemen kinerja organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, rekomendasi yang dapat disampaikan dalam rangka meminimalisir Isu penting yang dihadapi Satpol PP Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsi, tersebut antara lain :

1. Melakukan pembinaan terhadap personil linmas merupakan upaya Satuan Polisi Pamong Praja yang akan berdampak positif terhadap terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
2. Pentingnya melaksanakan sosialisasi tentang peraturan daerah yang ada di Satpol PP Kota Bekasi agar penegakan Perda bisa berjalan secara optimal. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam menciptakan ketertiban umum yang menjadi bagian dari pencapaian tujuan RPJM Kota Bekasi dalam mengemban misi “Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat”
3. Penguatan terhadap kelembagaan maupun peraturan perundang-undangan tingkat kota.
4. Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan dan akuntabilitas kinerja organisasi merupakan salah satu upaya Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tupoksinya untuk memberikan dampak positif untuk mendukung tujuan Walikota Bekasi dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Peluang dan Tantangan secara internal dan eksternal yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya melakukan pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat secara rinci pada **Tabel 2.4 Analisis SWOT** berikut :

Tabel 2.4 Analisis SWOT terkait Strategis dalam menghadapi Peluang dan Tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja

	Peluang (O)	
FAKTOR EKSTERNAL	➤ Besarnya minat investor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi\ ➤ Menguatnya tuntutan akan demokratisasi dan <i>good governance</i>. ➤ Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. ➤ Wilayah Kota Bekasi yang relatif kondusif, aman dan nyaman. ➤ Letak strategis yang berdampingan dengan Ibukota Jakarta, menjadikan Kota Bekasi sebagai mitra DKI Jakarta. ➤ Masih kuatnya norma-norma agama dalam masyarakat yang terpelihara dengan baik. ➤ Meningkatnya kerjasama regional dan nasional	➤ Kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (<i>trantibum</i>) adalah ancaman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram maka investasi akan sulit berkembang. ➤ Semakin kompleksnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga rawan terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan baik, karena menyangkut kewibawaan Pemerintah dan tingkat kepercayaan masyarakat; ➤ Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; ➤ Heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik sisi agama, etnis / suku budaya, bahasa, adat kebiasaan menyebabkan Bekasi menyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik
FAKTOR INTERNAL		

		antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya; ➤ Semakin menjamurnya Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang meresahkan masyarakat; ➤ Asset-asset milik Pemerintah Daerah Kota Bekasi yang tersebar di banyak titik sehingga memerlukan pengawasan dan secara rutin agar tidak disalahgunakan oleh pihak- pihak yang tidak bertanggung ➤ Meningkatnya Penyakit Masyarakat (PEKAT), penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/ AIDS di Kota Bekasi.
	<u>Ancaman (T)</u> ➤ Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan barang/ Jasa. ➤ Terbatasnya Prasarana untuk menunjang ketugasan. ➤ Koordinasi di dalam kerjasama antar kabupaten/ kota masyarakat dan stake holders masih kurang.\ ➤ Pengawasan dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah belum optimal ➤ Wilayah perbatasan rawan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang masih belum mendapatkan perhatian khusus ➤ Dukungan anggaran belum memadai dalam pelaksanaan tugas pokok Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	➤ Masivnya penegakan perda dan perkara di DKI Jakarta berimbas kepada perpindahan PMKS KE Wilayah Kota Bekasi

Kekuatan (S) ➤ Komitmen Pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik ➤ Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. ➤ Adanya produk-produk peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. ➤ Terjalannya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi.	Alternatif Strategis ➤ Evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan ➤ Koodinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program dan kegiatan	Alternatif Strategis ➤ Pengembangan Sarana dan prasarana serta sistem informasi dan teknologi ➤ Pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi sesuai kebutuhan.
<u>Kelemahan (W)</u> ➤ Masih rendahnya pengembangan SDM Satpol PP sesuai dengan kualifikasi Permendagri Personil Satpol PP berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 ➤ Masih lemahnya sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 ➤ Masivnya penegakan perda dan perkara di DKI Jakarta berimbas kepada perpindahan PMKS ke Wilayah Kota Bekasi ➤ Masih kurangnya Koordinasi di dalam kerjasama antar intansi, kabupaten/ kota, masyarakat dan stake holders ➤ Kurang terintegrasinya perencanaan antar lintas perangkat daerah dalam penanganan ketertiban, kebersihan dan	Alternatif Strategis	Alternatif Strategis

keindahan ➤ Masih perlunya perhatian khusus terhadap wilayah perbatasan uang rawan gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban umum ➤ Masih belum memadainya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi Satpol PP terutama dalam pemenuhan standar minimal		
--	--	--

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Paraja Kota Bekasi Tahun 2025- 2030

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD yang Termuat dalam RPJMD

Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang sudah termuat dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan penganggaran tahunan. Serta memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 1 tahun dan diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan agar menjadi acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan renja SKPD untuk tahun perencanaan program dan kegiatan yang sama.

Review terhadap Rancangan RKPD merupakan langkah yang dilakukan untuk membandingkan antara Rancangan (RPJMD) dengan analisis kebutuhan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja.

Proses review ini dilakukan untuk memastikan apakah kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah sudah terakomodir dalam Rancangan I RKPD atau belum. Dengan demikian, usulan dapat diajukan kembali pada tahapan Rancangan RKPD. Hasil review Rancangan RKPD (RPJMD Kota Bekasi) Tahun 2025 terkait Satuan Polisi Pamong Praja adalah seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 masih terdapat sedikit perbedaan dengan kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja untuk Tahun Anggaran 2025, yaitu Anggaran hasil rancangan RKPD masih sedikit lebih besar daripada usulan kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi sebagaimana disajikan dalam tabel sebagai berikut

Persandingan rancangan RKPD (RPJMD Tahun 2025) dengan kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja terlihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan RKPD (yang termuat dalam RPJMD) Tahun 2025 Kota Bekasi

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	3	5	6				5	6	9	12	20
	Satuan Polisi Pamong Praja				112.668.359.980,00	Satuan Polisi Pamong Praja				99.151.725.211,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				112.668.359.980,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				99.151.725.211,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				112.668.359.980,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				99.151.725.211,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100 %	75.841.426.100,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100 %	75.715.995.731,00	

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100 %	160,000,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100 %	160,000,000.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	150.000.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	92.640.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10.000.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	64.765.806.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	46.799.112.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang/bulan	64.755.806.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11096 Orang/bulan	51.737.542.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	0,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		100 %	2.920.224.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		100 %	2.920.224.000,00	

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15 Unit	0,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15 Unit	0,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2.620.224.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	2.620.224.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	300.000.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	256.500.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100 %	1.538.886.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100 %	1.538.886.800,00	
	Penyediaan Komponen					Penyediaan Komponen					

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

	Instalasi					Instalasi					
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Kota Bekasi, Medans atria, Harapan mulya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.348.030,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.348.030,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Kota Bekasi, Medans atria, Harapan mulya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	325.723.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	325.723.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Kota Bekasi, Medans atria, Harapan mulya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	565.656.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	565.656.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	132.963.770,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	132.963.770,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Fasilitasi Kunjungan Tamu					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	100.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	340.196.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	256.096.000,00	

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	300.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	1.176.305.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	1.176.305.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit	1.519.840.281,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit	1.176.305.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	101.290.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100 %	1.600.200.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan	100 %	26.438.918.560,00	

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

								Penunjang Urusan			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Kota Bekasi, Medans atria, Harapan mulya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.240.200.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.240.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Kota Bekasi, Medans atria, Harapan mulya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	360.000.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.207.652.350,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	3.680.004.300,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 %	3.680.004.300,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan					

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

	Dinas Jabatan					Dinas Jabatan					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	281.004.300,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	281.004.300,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	1.700.000.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	1.700.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	699.000.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	699.000.000,00	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026

		mulya									
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.000.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	485.316.000,00	
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat Peneyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Rasio pelindungan masyarakat tiap kelurahan		36.826.933.880,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Tingkat Peneyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Rasio pelindungan masyarakat tiap kelurahan	100 1 : 31 % Rasio	23.435.729.480,00	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat		36.097.578.880,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat	100 %	36.683.100.480,00	

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026

	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	450.000.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	70.770.000,00	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	21.082.706.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	20.139.960.000,00	
	Peningkatan Kapasitas					Peningkatan Kapasitas					

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

	SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	500 Orang	490.000.000,00			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	534.450.000,00	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	1.248.309.700,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	599.131.300,00	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui					Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026

	Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	116 laporan	2.325.252.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	116 laporan	673.952.000,00	
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	5.625.218.080,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	928.318.080,00	
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah					Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	103.593.100,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada	1 Laporan	76.593.100,00	

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

								warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	15 Unit	4.772.500.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	22 Unit	0,00	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		729.355.000,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	100 %	729.355.000,00	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	147.370.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	147.370.000,00	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					
		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	311.700.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	153.300.000,00	
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026

		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	270.285.000,00		Kota Bekasi, Medansatria, Harapanmulya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	111.885.000,00	
					112.668.359.980,00					99.151.725.211,00	

Arah pembangunan Kota Bekasi tahun 2026 menekankan pada pencapaian target atas sasaran – sasaran yang sudah ditetapkan dalam Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kemampuan untuk berperan serta untuk mengatasi permasalahan yang sangat mendasar di dalam menciptakan, memelihara Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, dengan alasan yang kuat antara lain :

1. Pelayanan penegak hukum masih dirasakan kurang, baik dari sisi jumlah, kualitas, kecepatan, ketegasan maupun pemerataan pelayanan hukum;
2. Masih tingginya kasus pelanggaran Perda oleh masyarakat.
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Masih tingginya unjuk rasa di Kota Bekasi
5. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP.
6. Semakin menjamurnya gelandangan, pengemis, anak jalanan, di wilayah Kota Bekasi yang menimbulkan keresahan masyarakat sehingga memerlukan penanganan yang serius terutama penanganan pasca dilakukan penertiban atau operasi.
7. Permasalahan di daerah perbatasan dalam bidang penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, perjudian, dan miras.
8. Daerah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta gejolak sosial karena heterogenitas masyarakat Kota Bekasi yang mayoritas bukan penduduk tetap;
9. Besarnya tuntutan masyarakat akan reformasi birokrasi;
10. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;
11. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, aparat maupun lembaga dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sejalan dengan perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dalam hal ini merupakan aspirasi langsung yang disampaikan dari masyarakat sebagai *stakeholder* yang disampaikan melalui forum musrenbang dari tingkat kelurahan, sampai dengan kecamatan. Usulan program dan kegiatan tersebut kemudian direkapitulasi dan dianalisa kembali oleh perangkat daerah dalam hal ini SKPD terkait dalam hal urgensi pelaksanaan, kesesuaian terhadap

tupoksi SKPD dan ketersediaan anggaran. Hasil pengolahan tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan dalam melakukan proses tolak dan terima.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kota Bekasi 2025- 2030 akan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pentingnya keselarasan atau sinkronisasi antara daerah dan tingkat nasional (pusat) karena pencapaian pembangunan nasional merupakan hasil agregat pencapaian berbagai daerah secara berjenjang dari mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan kata lain, target pembangunan nasional mustahil tercapai apabila program pembangunan di daerah tidak sinkron atau tidak mendukung program pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian pembangunan tersebut diperlukan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan untuk memantapkan keterkaitan antar tingkatan pemerintah dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan telaahan baik terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat (Nasional) maupun juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Di samping itu, perlu ditelaah Renja Kementerian/Lembaga terkait yang ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renja K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Hasil telaahan terhadap Renja K/L menjadi masukan dalam perumusan isu -isu strategis Perangkat Daerah yang akan ditangani pada Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota periode berikutnya.

Selain dilakukan penelaahan terhadap kebijakan nasional, dilakukan juga penelaahan terhadap Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2026.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2030 terdiri dari 5 (lima) Tujuan dan 11 (sebelas) Sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, berdasarkan RPJMD
Kota Bekasi Tahun 2025-2030

NO.	TUJUAN RPJMD KOTA BEKASI TAHUN 2025-2030	SASARAN RPJMD KOTA BEKASI 2025-2030
1	Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari	1. Terwujudnya estetika kota disertai infrastruktur modern
		2. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang lestari
		3. Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
2	Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis	1. Terwujudnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata
		2. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat
		3. Terwujudnya ketangguhan keluarga
		4. Terwujudnya kesetaraan gender
		5. Terwujudnya pemenuhan hak anak
		6. Terwujudnya pemuda dan kebudayaan maju
3	Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi yang tangguh dan inklusif	1. Terwujudnya ekonomi kota yang bertumpu pada industri dan perdagangan
		2. Berkembangnya pariwisata kota, ekonomi kreatif dan digital
		3. Terwujudnya ketahanan pangan kota
4	Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif
		2. Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat
		3. Terwujudnya kerja sama kota yang efektif
		4. Meningkatnya tingkat tenaga kerja
5	Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan kota
		Terwujudnya Kota Bekasi cerdas

Ditinjau dari tujuan pembangunan daerah RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2030, tujuan yang memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Bekasi adalah tujuan keempat yaitu " Terwujudnya iklim investasi Kota Bekasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi " dengan sasaran kedua yaitu "**meningkatnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat** ". Berdasarkan uraian program sebagai tindak lanjut dari sasasaran tugas ini dilaksanakan oleh Kesbangpol yaitu dengan sasaran terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator Indeks Harmoni Indonesia.

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah. Rencana program Perangkat Daerah ini merupakan program untuk mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030

Program yang berkaitan langsung dengan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dalam RPJMD Kota Bekasi adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban dengan nilai Program yang akan meningkat terus dari Tahun ke Tahun, yaitu dengan pagu indikatif sebesar Rp **112.668.359.980,00** pada Tahun 2025 dan pagu berdasarkan analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja adalah Rp **99.151.725.211,00** pada Akhir tahu perencanaan Tahun 2025

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2025 - 2030, Satpol PP Kota Bekasi memiliki tujuan yaitu Terwujudnya Kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu Terwujud kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan sasaran Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bekasi Tahun 2025-2030

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun 2026
	Terwujud kualitas ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,	100%

	serta perlindungan masyarakat	ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Ketenteraman, Keindahan)	
			Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	100%
			Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan	1 : 31

Tujuan 1	Terwujud kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Sasaran 1	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat

Sumber : Hasil Olahan berdasarkan RPJMD Kota Bekasi 2025 - 2029 dan INMEN No.02 Tahun 2025

Selanjutnya Indikator dari masing masing Tujuan Program Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan untuk lebih lengkapnya pada Tabel 3.4.

Tabel 3.3.
Tujuan dan Indikator Tujuan Program Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi, Tahun 2026

Tujuan 1	Terwujud kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Indikator Tujuan	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentram dan Ketertiban Umum

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2030

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Program Kerja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada Tabel 3,4 berikut ini.

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran dan Target Rencana Kerja Tahun 2026 berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (RPJMD Kota Bekasi)

PROGRAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujud kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Penegakan Pelanggaran Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31	1 : 31

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya capaian kinerja keuangan penunjang urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah	85%	86%	87%	88%	89%	90%
	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Data diolah berdasarkan RPJMD Kota Bekasi 2025 - 2029 dan INMEN No.02 Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang selaras dengan RPJMD Kota Bekasi, tujuan utama pada tahun 2026 adalah Terwujud kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dengan Sasaran yang ingin dicapai Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan pelindungan Masyarakat. Target kinerja tahun 2026 antara lain terselesaikannya 100% Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan), Persentase Penegakan Pelanggaran Perda, dan Rasio Perlindungan Masyarakat Tiap Kelurahan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2030 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2030.

Pada Tahun 2026, Satpol PP Kota Bekasi akan melaksanakan 2 (dua) program antara lain :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program-program tersebut didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan yang berjumlah 9 (sembilan) kegiatan yaitu 7 kegiatan untuk Program 1 dan 2 kegiatan untuk Program 2. Program 1 dari 9 kegiatan terdiri dari 25 sub kegiatan dan Program 2 terdiri dari 2 kegiatan dan 12 sub kegiatan.

Secara rinci Tabel 3.5 berikut adalah program dan kegiatan serta sub

kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun 2025 serta prakiraan
maju 2026.

Tabel 3.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2					3	4	10		115.050.137.483,00	11	13	14	15	16
						Satuan Polisi Pamong Praja				115.050.137.483,00					0,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				115.050.137.483,00					0,00
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				79.063.611.770,00					0,00
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		100 %	20.000.000,00				-	0,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

	1	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK h yang disusun sesuai NSPK		100 %	20.000.000,00		4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Satuan Polisi Pamong Praja	-	0,00
	1	0	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		5	1	1	1		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Satuan Polisi Pamong Praja		0,00
	1	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
		5	1	1	6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Satuan Polisi Pamong Praja		0,00
	1	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan		100 %	62.079.979.000,00		4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	-	0,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

							Perangkat Daerah sesuai NSPK									
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
		5	1	2	1		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang/bulan	62.069.979.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja			0,00
	1	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		5	1	2	5		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja			0,00
	1	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK		100 %	1.000.000.000,00		4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	-		0,00
	1	0	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
		5	1	5	2		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja			0,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

	1	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK		100 %	1.460.342.770,00		4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	-	0,00
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		0,00
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	325.723.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		0,00
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	565.656.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		0,00
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	132.963.770,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		0,00
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
		5	1	6	6		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		0,00
	1	0	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		5	1	6	8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		0,00
	1	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		5	1	6	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	256.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		0,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

	1	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan		100 %	4.923.290.000,00		Mengemban gkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksplotatif 4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	-	-	0,00
	1	0	0	2.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
		5	1	7	2		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	4.822.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengemban gkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksplotatif 4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	-		0,00
	1	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		5	1	7	6										

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	101.290.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	-		0,00
	1	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK		100 %	1.400.000.000,00		4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	-	0,00
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		0,00
	1	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah		100 %	8.180.000.000,00		4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Barang Milik Daerah	-	0,00
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	281.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Barang Milik Daerah		0,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Unit	1.700.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Barang Milik Daerah		0,00
	1	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	699.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Barang Milik Daerah		0,00
	1	0	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	5.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Barang Milik Daerah		0,00
2	1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Peneyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan		100 % 1: 31 Rasio	35.986.525.713,00				-	0,00

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

	1	0	0	2.0		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat		100 %	35.718.525.713,00		4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Masyarakat Kota Bekasi	-	0,00
	1	0	0	2.0	000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	238.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Masyarakat Kota Bekasi		0,00
	1	0	0	2.0	000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum									
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	26.791.926.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5. SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM	Masyarakat Kota Bekasi		0,00
	1	0	0	2.0	000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum									

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	593.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Masyarakat Kota Bekasi		0,00
						dalam Teknik Pencegahan Kejahatan								
	1	0	0	2.0	001	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional								
		5	2	1	0									
						Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	366.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Masyarakat Kota Bekasi		0,00
	1	0	0	2.0	001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan								
		5	2	1	5									
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 laporan	673.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Masyarakat Kota Bekasi		0,00
	1	0	0	2.0	001	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa								

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

		5	2	1	6									
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.790.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Masyarakat Kota Bekasi		0,00
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah								
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	103.593.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Masyarakat Kota Bekasi		0,00
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum								

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

						Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	4.162.756.613,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Masyarakat Kota Bekasi		0,00
	1	0	0	2.0		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ktentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	100 %	268.000.000,00		4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Masyarakat Kota Bekasi	-	0,00
	1	0	0	2.0	001	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah								
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	193.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Masyarakat Kota Bekasi		0,00
	1	0	0	2.0	001	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026

						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4. SPM BIDANG TRANTIBU MLINMAS	Masyarakat Kota Bekasi		0,00
	J U M L A H								115,050,137,483					0,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

Pada tahun 2026 Satpol PP Kota Bekasi akan melaksanakan 2 (dua) Program, yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Berikut program yang dilaksanakan tahun 2026 :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan administrasi, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, meningkatkan kemampuan SDM/ aparatur Satpol PP Kota Bekasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan Satpol PP yang berkualitas, serta untuk mewujudkan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas Satpol PP Kota Bekasi yang akuntabel

2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini bertujuan untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman dan tertib sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan personil, penegakan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta perlindungan masyarakat, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah;
3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah;
4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau peraturan Kepala Daerah;
5. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
6. meningkatkan kualitas SDM aparatur Satpol PP guna melaksanakan tugas, pokok dan fungsi.

Dengan tanggung jawab sebagai salah satu pendukung kemajuan pembangunan Kota Bekasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi memiliki rencana kerja tahun 2026 hasil desk dengan total pagu sebesar **Rp115.050.137.483,-** dengan Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut (daftar terlampir).

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		
							Targer Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
					Satuan Polisi Pamong Praja			115.050.137.483	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			115.050.137.483	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			115.050.137.483	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100 %	79.063.611.770	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK h yang disusun sesuai NSPK	100 %	20.000.000	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	100 %	62.079.979.000	

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		
							Targer Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	62.069.979.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	100 %	1.000.000.000	
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	100 %	1.460.342.770	
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	325.723.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		
							Targer Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	565.656.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	132.963.770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	256.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	100 %	4.923.290.000	
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	4.822.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	101.290.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai	100 %	1.400.000.000	

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		
							Targer Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
						NSPK			
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 %	8.180.000.000	
1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	281.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	1.700.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	699.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		
							Targer Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Rasio perlindungan masyarakat tiap kelurahan	100 % 1: 31 Rasio	35.986.525.713	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ktentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	100 %	35.718.525.713	
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	238.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	26.791.926.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	593.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional				

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		
							Targer Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
						Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	40 Orang	366.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1 laporan	673.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	2.790.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah				
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	103.593.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum				

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026		
							Targer Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
						Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	4.162.756.613	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ktentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat	100 %	268.000.000	
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan	193.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
J U M L A H								115.050.137.483,00	

BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan penjabaran Renstra Satpol PP kota Bekasi Tahun 2025-2030 dan mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2030.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi para stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan) Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bekasi. Ruang lingkup perencanaan penegakan Perda dan menciptakan ketertiban serta keamanan di Kota Bekasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.

Adapun kaidah pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2026 antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
2. Seluruh komponen bidang, sub bidang dan sub bagian pada Satpol PP Kota Bekasi agar melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Satpol PP Kota Bekasi tahun 2026 dengan Sebaik-baik nya;
3. Program-program yang tercantum dalam Renja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2026 diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya dengan memperhatikan anggaran;
4. Agar Renja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2026 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen Satpol PP Kota Bekasi diharapkan mengupayakan penguatan peran *Stakeholder* dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target Renja Akhir Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2026, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas.

Rencana tindak lanjut Satpol PP Kota Bekasi Pada Tahun 2026 akan melaksanakan ;

1. Pelaksanaan Konsultasi Publik
2. Pelaksanaan Musrembang
3. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan
4. Pembinaan dan pemanfaatan Data dan informasi SKPD
5. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
6. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas upaya penyeragaman dan penyamaan persepsi melalui komunikasi, koordinasi dan konsolidasi internal mutlak diperlukan sehingga pencapaian target kinerja bukan hanya tanggung jawab Kepala SKPD selaku pimpinan satpol PP melainkan seluruh jajaran pemangku jabatan di setiap bidang beserta staf yang ada dibawahnya.

Dengan tersusunnya Renja ini, diharapkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis serta sejalan dengan tugas dan fungsi. Akhirnya, dengan diselesaikannya penyusunan dokumen Renja Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2026 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Satpol PP yang melaksanakan program dan kegiatan.

Segala kekurangan diharapkan selalu menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk selanjutnya bisa mencapai hasil yang maksimal.

Bekasi, Agustus 2026
KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BEKASI



KARTO, S.IP, M.SI
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19670415 198603 1 005